KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bahas RUU Kesehatan, Komisi IX Optimalkan Serap Aspirasi Publik
Tanggal : Minggu, 09 April 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Bahas RUU Kesehatan
Komisi IX Optimalkan Serap Aspirasi Publik

DPR bersama Pemerintah segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. RUU ini diharapkan cepat disahkan menjadi produk legislasi yang dapat menjawab persoalan kesehatan saat ini.

Anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan, RUU ini akan diselesaikan sebaik mungkin.

"Ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan Pak Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin)," kata Darul di Jakarta, kemarin.

Darul memastikan, pihaknya tetap terbuka terhadap semua masukan dan aspirasi publik yang merasa punya kepentingan dengan hadirnya RUU ini.

"Kita tidak menutup pintu semua informasi. Semua aspirasi yang ingin disampaikan ke Komisi IX selama pembahasan ini tetap kita terima," ujarnya.

Hal senada dilontarkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena. Dia menegaskan, semua fraksi dan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan punya spirit yang sama. Punya tekad memaksimalkan *public hearing* agar semua aspirasi publik dapat diserap dan diterima ketika RUU ini dibahas bersama Pemerintah.

"Kita akan lebih mengoptimalkan, mendengarkan semua pendapat dari semua sektor publik dan semua lapisan masyarakat agar RUU ini bisa jadi milik kita bersama," ujarnya.

Dia juga memastikan, pembahasan RUU ini bersama Pemerintah akan melalui semua mekanisme yang berlaku, memperhatikan semua aturan yang ada.

"Juga tetap menjaga agar substansi dan tujuan pembentukan undang-undang ini bisa dirumuskan dengan baik. Saya kira ini bagian dari komitmen kita bersama," tambah dia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Pemerintah sangat mendukung hadirnya RUU Kesehatan. Apalagi RUU inisiatif DPR ini sejalan dengan transformasi bidang kesehatan yang terdiri dari enam pilar. Yakni, transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi layanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

"Pendekatan Pemerintah untuk mendukung RUU inisiatif DPR ini memastikan bahwa apa pun yang kita lakukan nanti bisa memberikan dampak kepada masyarakat semaksimal mungkin," ujarnya.

Dalam transformasi layanan primer misalnya, Budi menilai, banyak layanan yang sudah bergeser ke pendekatan kuratif, bukan bersifat preventif. Padahal, salah satu filosofi dasar di sistem kesehatan nasional adalah harus lebih fokus kepada promotif preventif.

Pihaknya juga melihat masih ada pendekatan kesehatan yang masih terkotak-kotak berdasarkan jenis penyakit.

"Kita juga menyadari masyarakat masih sulit mendapatkan akses layanan kesehatan yang sifatnya primer dan laboratorium. Makanya, ini kita perkuat juga agar lebih dekat ke masyarakat," ujarnya. ■ KAL